

RINGKASAN

IRWAN GOSIDI (NPM: 4491673FH13). Skripsi “Tata Kelola Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau Dari Undang-Undang No.25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur)”.

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan” inilah dasar terbentuknya koperasi, dalam mencapai itu fakta menunjukkan bahwa Negara ini masih belum menemukan sistem sistem ekonomi yang tepat bagi sistem ekonomi koperasi ditandai dengan “bergantinya undang-undang tentang koperasi yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tapi dalam perjalanan waktu dimana Undang-Undang No. 17 ini masih berjalan 2 tahun diganti lagi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dari situasi ini muncul pertanyaan yang kompleks mengenai konsistensi hukum perkoperasian. Hal yang menarik dalam penelitian ini tentu saja terkait nilai positif dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebelum digantikan ke Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana tata kelola koperasi simpan pinjam ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; dan 2) untuk mengetahui permasalahan dan cara menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan koperasi ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Untuk mengetahui permasalahan di atas adalah dengan jenis penelitian kualitatif, subjeknya adalah masyarakat Lombok Timur dan pelaku-pelaku koperasi Untuk memperoleh data penelitian dipilih informan dari Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada 3 (tiga) yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil pengumpulan data ini dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola koperasi dengan diterapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tidak berdampak langsung terhadap anggota koperasi, perkembangan koperasi dan masyarakat secara umumnya. Tata kelola koperasi lebih mengarah kepada aspek internal organisasi koperasi di Kabupaten Lombok Timur, yang antara lain: 1) meningkatkan keterampilan berwirausaha bagi anggota koperasi; 2) meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pelaku koperasi; 3) melatih anggota untuk meningkatkan kerjasama dengan anggota lain; 4) meningkatkan kemandirian koperasi; dan 5) Mendorong peningkatan partisipasi anggota di dalam koperasi. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 justru terdapat solusi yang menjurus pada 1) penjelasan rinci tentang ketentuan-ketentuan hukumnya; 2) ketegasan dalam memajemen modal koperasi; 3) ketentuan partisipasi aktif keanggotaan; dan 4) ketentuan bagi kewenangan koperasi yang mandiri dan semakin otonom.

Kata Kunci : Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Tata Kelola Koperasi